

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Desentralisasi Pendidikan

a. Pengertian Desentralisasi Pendidikan

Secara umum desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan wewenang (authority) dan tanggung jawab (responsibility) dari institusi pendidikan tingkat pusat kepada institusi pendidikan di tingkat daerah hingga pada tingkat sekolah. Desentralisasi mengandung arti pelimpahan kekuasaan oleh pusat kepada aparat pengelola pendidikan yang ada di daerah pada tingkat propinsi maupun lokal, sebagai perpanjangan aparat pusat untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam pengelolaan pendidikan di daerah. (Mulyasa, 2005:22)

Pada praktiknya, desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya, kalau desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain berada pada pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, maka desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten/kota, tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Pada praktik desentralisasi pendidikan itulah maka dikembangkanlah yang dinamakan Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS. (Hasbullah, 2010:12-14).

Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak baik secara regional maupun secara internasional. Desentralisasi juga memiliki tujuan yang penting.

b. Tujuan Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan mempunyai tujuan yang bervariasi berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan di beberapa Negara.

Menurut Armida S (2002:2) tujuan dari desentralisasi adalah:

- 1) Mencegah pemusatan keuangan
- 2) Sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis

Sedangkan menurut Hanson (2004:27) tujuan utama dari desentralisasi adalah :

- 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi
- 2) Meningkatkan efisiensi manajemen
- 3) Distribusi tanggung jawab dalam bidang keuangan
- 4) Meningkatkan demokratisasi melalui distribusi kekuasaan

- 5) Kontrol lokal menjadi lebih besar melalui deregulasi
- 6) Pendidikan berbasis kebutuhan pasar
- 7) Menetralisasi kebutuhan-kebutuhan kekuasaan
- 8) Meningkatkan kualitas pendidikan

Kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama desentralisasi adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengurangi beban kerja pemerintah pusat dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah. dengan kata lain tujuan desentralisasi adalah untuk merangsang kepekaan elit lokal terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat daerah.

Desentralisasi pendidikan merupakan peluang bagi peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain, merupakan peluang bagi peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah. Hal ini karena perhatian terhadap peningkatan mutu guru, peningkatan mutu manajemen kepala sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan menjadi lebih baik jika dikelola oleh para pejabat pendidikan yang ada di daerah. Pada akhirnya, tujuan desentralisasi pendidikan adalah pada peningkatan mutu pendidikan.

2. Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu atau yang sering disebut dengan kualitas merupakan aspek penting dalam setiap hal seperti mutu sebuah produk, mutu layanan publik dan juga hal yang tidak kalah penting adalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan merupakan salah satu masalah nasional yang dihadapi

dan mendapat perhatian sungguh-sungguh dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia guna mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Mutu pendidikan merupakan sumber dari kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Menurut kamus besar bahasa Indonesia mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar atau derajat (kepandaian, kecerdasan dan kualitas). Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses dan hasil pendidikan. Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan dibentuknya komite sekolah yang mewadahi peran serta masyarakat untuk membantu sekolah meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut Sudrajat (2005:25) pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi non akademik, yang dilandasi kompetensi personal dan social, serta nilai-nilai akhlak mulia yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*). Sedangkan menurut Hadis (2010: 70) tolak ukur pendidikan bermutu dari sebuah institusi pendidikan adalah dari kemampuan institusi tersebut dapat melahirkan sumber daya manusia yang bermutu. Faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan meliputi kurikulum, alat atau media pendidikan, dan proses belajar mengajar.

Disimpulkan bahwa pendidikan yang bermutu mampu menghasilkan sumber daya yang berkompetensi baik akademik maupun non akademik,

dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurikulum, media dan proses belajar mengajar, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Kurikulum

Menurut Ramayulis (2004:128) Kurikulum merupakan variabel pendidikan yang menjadi salah satu faktor dominan terjadinya proses pembelajaran. Kurikulum khusus digunakan dalam pendidikan dan pengajaran yakni sejumlah mata pelajaran di sekolah harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah, tingkat atau keseluruhan pembelajaran yang di sajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curere* yang berarti tempat berpacu. Jadi, kurikulum mengandung arti suatu jarak yang harus di tempuh dari garis start sampai garis finish.

Sedangkan menurut Rosyada (2007:26) kurikulum adalah perencanaan yang ditawarkan, bukan yang diberikan, karena pengalaman yang diberikan guru belum tentu ditawarkan. Dengan demikian seluruh konsep pendidikan di sekolah harus ideal. Kurikulum harus bicara keharusan bukan kemungkinan. Dalam proses pendidikan tersebut diatas, kurikulum menempati posisi yang sangat menentukan. Ibarat tubuh, kurikulum merupakan jantung pendidikan. Kurikulum merupakan seperangkat rancangan nilai, pengetahuan dan keterampilan yang harus ditransfer kepada peserta didik dan bagaimana proses transfer tersebut harus dilaksanakan.

Beberapa pengertian mengenai kurikulum diatas dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan

mengenai tujuan, isi dan bahan ajar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran dan proses pencapaian tujuan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal dengan dibantu adanya alat / media pendidikan.

b. Alat / Media Pendidikan

Arsad (2010:128) Menjelaskan kata media berasal dari bahasa Latin medium yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Pada bukunya Sadiman (2009:6), Briggs berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan media, menurut Asosiasi Pendidikan Nasional adalah bentuk-bentuk komunikasi baik secara tercetak maupun audiovisual serta peralatan lainnya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan baca. Apapun batasan yang diberikan, ada persamaan di antara batasan tersebut yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim dan penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi

Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa alat atau media pembelajaran menjadi perantara atau pengantar yang dapat digunakan untuk merangsang siswa agar lebih perhatian dan menarik minat siswa dalam proses belajar mengajar sehingga bisa memperoleh hasil lebih optimal.

c. Proses Belajar mengajar

Dalam keseluruhan proses pendidikan kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara profesional. Menurut Adrian (2005:25) dalam artikelnya yang berjudul “metode mengajar berdasarkan tipologi belajar siswa”, menjelaskan proses belajar mengajar melibatkan beberapa komponen yaitu guru (pendidik), peserta didik, tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, metode mengajar, media dan evaluasi pembelajaran.

Disimpulkan bahwa proses belajar mengajar tergantung bagaimana rancangan proses belajar yang dijalankan oleh guru dengan memperhatikan aspek yang terdapat dalam rancangan proses pembelajaran seperti tujuan, isi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, waktu, dan evaluasi yang digunakan.

3. Komite Sekolah

a. Latar Belakang Komite

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 75 Tahun 2016 Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Menurut Mulyasa (2010: 124) komite sekolah merupakan suatu lembaga yang perlu dibentuk dalam rangka pelaksanaan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dan

KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Anggota komite sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, beberapa tokoh masyarakat, serta orang tua yang memiliki potensi dan perhatian besar terhadap pendidikan.

Menurut Rusman (2008: 512) komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Nama badan disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, atau nama lain yang disepakati.

Azas legalitas komite sekolah termuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam pasal 56 ayat 3 yang berbunyi “Komite sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”

Berdasarkan berbagai kajian mengenai pengertian komite sekolah diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Komite Sekolah merupakan badan yang berkedudukan pada satuan pendidikan yang mewadahi peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

b. Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah

Komite sekolah berkedudukan di suatu pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintahan. Berdasarkan Kemendiknas nomor 044/U/2002, komite sekolah bertujuan untuk :

(1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan; (3) menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Sedangkan berdasarkan Permendikbud nomor 75/U/2016 tanggal 30 Desember 2016 mengenai acuan pembentukan komite sekolah, mengenai tujuan komite sekolah adalah sebagai berikut :

(1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) komite sekolah menjalankan tugasnya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Ada perbedaan pada kedudukan dan sifat komite yang dapat dilihat pada poin ketiga, dimana pada Permendikbud nomor 75/U/2016 lebih menekankan untuk menjalankan tugasnya secara gotong royong, tidak hanya menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang

bermutu di satuan pendidikan saja sehingga bisa tercapainya tujuan komite.

(2) Tujuan Komite Sekolah

Komite sekolah sama seperti organisasi-organisasi lainnya yang mempunyai tujuan penting. Berdasarkan Kemendiknas nomor 044/U/2002, komite sekolah bertujuan untuk :

(1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta asyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (2) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Sedangkan berdasarkan Permendikbud nomor 75/U/2016 tanggal 30 Desember 2016 mengenai acuan pembentukan komite sekolah, tujuan komite sekolah adalah sebagai berikut :

- 1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melirkan kebijakn operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan
- 2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan di satuan pendidikan.

Ada perbedaan dimana dalam Permendikbud nomor 75/U/2016 sebagaimana diketahui, tata kelola sekolah terutama terkait dengan tranparasi, akuntabilitas, dan partisipasi tidak tercantumkan karena dirasa masih buruk . Penyusunan program, kegiatan, anggaran dan pertanggung jawaban keuangan sekolah masih dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan komite sekolah dan orang tua, maka dalam hal ini sangat diperlukannya peran komite.

(2) Peran Komite Sekolah

Komite sekolah mempunyai beberapa poin penting dalam menjalankan perannya. Berdasarkan Kemendiknas nomor 044/U/2002, komite sekolah berperan sebagai berikut :

(1) pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (2) pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; (4) mediator (*mediator agency*) sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan.

Sedangkan berdasarkan Permendikbud nomor 75/U/2016 tanggal 30 Desember 2016 mengenai acuan pembentukan komite sekolah, peran komite sekolah adalah sebagai berikut :

- 1) pemberi pertimbangan (*advisory agency*)
- 2) pendukung (*supporting agency*)
- 3) pengontrol (*controlling agency*)

Adanya perbedaan dalam Permendikbud nomor 75/U/2016 dimana dalam peran komite sekolah terdapat mediator (*mediator agency*) tidak tercantumkan sehingga peran komite sekolah hanya ada 3 poin saja yaitu pemberi pertimbangan, pendukung, dan pengontrol. Komite selain memiliki peran komite juga memiliki fungsi yang sama penting.

(3) Fungsi Komite Sekolah

Komite sekolah selain mempunyai peran juga mempunyai fungsi penting dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Kemendiknas nomor 0444/U/2002, fungsi komite sekolah adalah sebagai berikut :

(1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2) melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (3) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (4) memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai : a) kebijakan dan program pendidikan; b) rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS); c) kriteria kinerja satuan pendidikan; d) kriteria tenaga pendidikan; e) kriteria fasilitas pendidikan; f) hal lain yang terkait dengan pendidikan; (5) mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; (6) menggalang dana dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Sedangkan berdasarkan Permendikbud nomor 75/U/2016 tanggal 30 Desember 2016 mengenai acuan pembentukan komite sekolah, fungsi komite sekolah adalah sebagai berikut :

(1) memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: a) kebijakan dan program sekolah; b) rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah / rencana kerja dan anggaran sekolah (RAPBS/RKAS); c) kriteria kinerja sekolah; d) kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; e) kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain; (2) menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri/ maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; (3) mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; (4) menindaklanjuti keluhan, saran, aspirasi dari peserta didik, orang tua/ wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

Ada perbedaan dalam Permendikbud sebelumnya fungsi komite sekolah cukup banyak dimiliki oleh komite sekolah dan direduksi dalam Permendikbud nomor 75/U/2016, sehingga yang semula ada 7 poin penting sekarang hanya ada 4 poin penting saja. Komite selain memiliki peran dan fungsi juga mempunyai struktur organisasi yang memudahkan dalam menjalankan peran dan fungsinya.

(4) Struktur Organisasi

Komite sekolah sama seperti organisasi-organisasi pada umumnya yang mempunyai susunan pengurus atau struktur organisasi. Berdasarkan Kemendiknas nomor 044/U/2002, struktur organisasi komite sekolah sebagai berikut :

1. Keanggotaan Komite Sekolah
 - a. Keanggotaan komite sekolah terdiri atas
 - i) Orangtua / wali peserta didik
 - ii) Tokoh masyarakat
 - iii) Tokoh pendidikan
 - iv) Dunia usaha/ industri
 - v) Organisasi profesi tenaga pendidikan
 - vi) Wakil alumni
 - vii) Wakil peserta didik
 - b. Unsur dewan guru, yayasan/ lembaga penyelenggaraan pendidikan, badan pertimbangan desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota sekolah (maksimal 3 orang)
 - c. Anggota komite sekolah sekurang-kurangnya 9 orang dan jumlahnya ganjil
2. Kepengurusan Komite sekolah
 - a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas : ketua, sekretaris, dan bendahara
 - b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota

- c. Ketua bukan dari satuan pendidikan
- 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(ART)
 - a. Komite sekolah wajib memiliki AD dan ART
 - b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
 - i) Nama dan tempat kedudukan
 - ii) Dasar, tujuan , dan kegiatan
 - iii) Keanggotaan dan kepengurusan
 - iv) Keuangan
 - v) Mekanisme dan rapat
 - vi) Perubahan Ad dan ART, serta pembubaran organisasi

Sedangkan berdasarkan Permendikbud nomor 75/U/2016 tanggal 30 Desember 2016 mengenai acuan pembentukan komite sekolah, struktur organisasi komite sekolah adalah sebagai berikut :

1. Anggota komite sekolah terdiri atas unsur :
 - a. Orangtua / wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50 %
 - b. Tokoh masyarakat paling banyak 30 %
 - c. Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat
 - d. Anggota / Pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/ pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik
 - e. Anggota komite sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang dan paling banyak 15 orang
 - f. Anggota komite sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/ wali siswa
 - g. Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua, sekertaris dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah melalui pemungutan suara

Ada perbedaan mengenai struktur organisasi dalam Kemendiknas nomor 044/U/2002 dimana anggota komite sekolah sekurang-kurangnya terdiri dari 9 orang dan jumlahnya gasal, sedangkan dalam Permendikbud nomor 75/U/2016 anggota komite sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang dan paling banyak

berjumlah 15 orang. Anggota komite tersebut dipilih melalui rapat bersama pihak sekolah, wali murid, dan masyarakat.

B. Kajian Peneliti Yang Relevan

Penelitian ini mengenai peran dan fungsi komite dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang ada ditemukan skripsi yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian dari Junaedi, jurusan pendidikan agama islam fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan UIN Syari Hidayatullah tahun 2011 dengan judul **“Kontribusi Peran Komite Sekolah Terhadap Mutu Layanan Pendidikan Di SMK Negeri 1 Depok”**.

Dengan hasil semakin besar peran komite sekolah maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Depok.

2. Penelitian dari Windi Retno Bintari, jurusan pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014 dengan judul **“Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu sekolah Di SD Negeri Megulung Lor Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo”**.

Hasil penelitian bahwa mutu pendidikan termasuk dalam kategori baik, akan tetapi komite sekolah tidak mencantumkan pemetaan kerja masing-masing anggota serta tidak memiliki program kerja.

- a. Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu

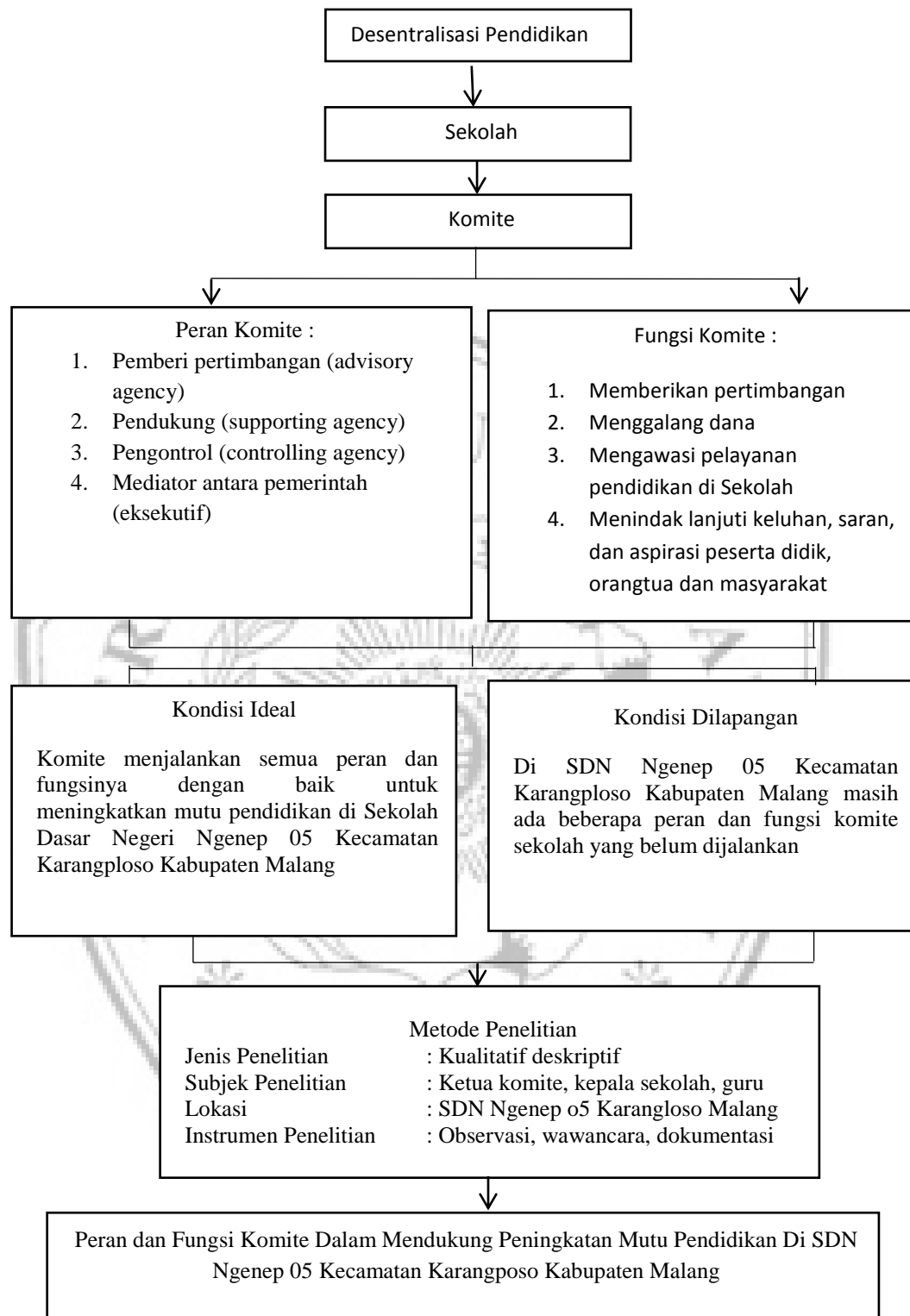
Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada peran komite dalam peningkatan mutu pendidikan

b. Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tidak membahas tentang peran komite saja tetapi juga membahas fungsi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan



C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir